



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No.11 Telp. dan Fax. (0536) 3224547
Palangka Raya 73112

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 selesai disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Kepala daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020. Berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan pedoman penyusunan dan mampu menggambarkan kinerja selama tahun 2021.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Palangka Raya, 10 Februari 2022

Pit. KEPALA DINAS,



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis.....	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Kondisi Kepegawaian.....	9
F. Isu – isu Strategis	13
G. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RPJMD Tahun 2016 – 2021	17
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	19
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1 Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	32
3.2 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga	47
3.3 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	60
3.4 Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Termasuk TPPO	64
3.5 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	70
3.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak.....	74

3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak	79
3.8 Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran	83
3.9 Menurunnya Angka Kelahiran	87
3.10 Meningkatnya Akseptor KB	92
3.11 Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need).....	94
B. Realisasi Keuangan	101
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	125
 LAMPIRAN	
A. Perjanjian kinerja tahun 2021	
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	
C. Penghargaan dan Prestasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2021	
D. Surat Reward dan Punishment	
E. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2020	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan rencana kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020. Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kedudukan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, yaitu Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah. Untuk itu seluruh program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada tujuan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan adalah (1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, (2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta (4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, Kesebelas sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah realisasinya pada tahun 2021 mencapai **Persen** dengan pengukuran pada masing-masing **tujuan strategis** sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	3,43	2,93	85,42
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	35,56	35,56	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,46	33,63	100,5
Rata – rata capaian Tujuan					95,31%

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan	Rasio kekerasan terhadap	Rasio	0,0151	0,0151	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
terhadap perempuan termasuk TPPO	perempuan				
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	100	100	100
Rata – rata capaian Tujuan					100 %

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	42,86	28,57	66,62
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0151	4,26	282,12
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	84,62	84,62
Rata – rata capaian Tujuan					108,93%

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas data gender dan anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	15,56	15	100
Rata – rata capaian Tujuan					100

**Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	B+	100%
Rata – rata capaian Tujuan					100%

**Tujuan 6 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga
sejahtera**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,24	100
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1	1	100
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,834	0,7985	95,32
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	16,61	11,6	69,83
Rata – rata capaian Tujuan					89,94%

Capaian Sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2021

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	85,42
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	100
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	108
6	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus kepada anak	84,62
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	100
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	B+
9	Menurunnya angka kelahiran	100
10	Meningkatnya akseptor KB	95,32
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	69,83
	Rata-rata persentase Capaian Sasaran	107,03 %

Dalam hal anggaran, dukungan APBD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.781.682.936,- dengan alokasi sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK(%)
1.	Belanja Operasional	11.610.310.876	10.778.357.710	92,83	100
2.	Belanja Modal	9.171.372.060	8.782.421.150	95,76	100
	Jumlah	20.781.682.936	19.560.778.860	94,13	100

Pencapaian kinerja input pada masing-masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	20.781.682.936	19.560.778.860	94,13	20.781.682.736	100,00
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.505.000.510	1.347.252.314	89,52	1.505.000.310	100,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.683.018.536	16.671.616.474	94,28	17.683.018.336	100,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.210.910	106.845.550	88,15	121.210.710	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.866.500	26.866.300	100,00	26.866.300	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.300.000	18.292.000	99,96	18.300.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.699.000	43.742.000	84,61	51.699.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.345.410	17.945.250	73,71	24.345.410	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.963.815.328	5.461.678.955	91,58	5.963.815.328	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.910.315.328	5.436.179.955	91,98	5.910.315.328	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.500.000	8.500.000	100,00	8.500.000	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	16.999.000	37,78	45.000.000	100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.600.000	3.400.000	19,32	17.600.000	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.600.000	3.400.000	19,32	17.600.000	100,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.000	582.000	100,00	582.000	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	582.000	582.000	100,00	582.000	100,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.276.298	1.712.646.450	90,99	1.882.276.298	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.429.034.300	1.263.243.550	88,40	1.429.034.300	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.011.000	34.011.000	100,00	34.011.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.762.000	21.725.000	99,83	21.762.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	24.990.000	99,96	25.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.072.998	295.785.900	99,23	298.072.998	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.396.000	62.891.000	97,66	64.396.000	100,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.163.186.000	7.929.585.990	97,14	8.163.186.000	100,00
	Pengadaan Mebel	705.866.000	696.610.850	98,69	705.866.000	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.457.320.000	7.232.975.140	96,99	7.457.320.000	100,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.396.741.200	1.322.432.172	94,68	1.396.741.200	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.005.000	4.005.000	100,00	4.005.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.350.000	80.906.922	64,54	125.350.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.386.200	1.237.520.250	97,64	1.267.386.200	100,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.606.800	134.445.357	97,70	137.606.800	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	56.606.800	54.002.400	95,40	56.606.800	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	49.910.957	99,82	50.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.535.000	96,13	12.000.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.997.000	99,97	10.000.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	1.426.673.400	1.403.370.460	98,37	1.426.673.400	100,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	152.245.200	139.197.660	91,43	152.245.200	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	90.000.000	77.042.780	85,60	90.000.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	62.245.200	62.154.880	99,85	62.245.200	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	-	-	0,00	-	0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.159.490.200	1.149.496.800	99,14	1.159.490.200	100,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.054.228.200	1.051.925.800	99,78	1.054.228.200	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	105.262.000	97.571.000	92,69	105.262.000	100,00
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	114.938.000	114.676.000	99,77	114.938.000	100,00
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	114.938.000	114.676.000	99,77	114.938.000	100,00
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	539.311.400	521.660.822	96,73	539.311.400	100,00
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	231.422.400	230.728.000	99,70	231.422.400	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	62.666.400	62.556.900	99,83	62.666.400	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	168.756.000	168.171.100	99,65	168.756.000	100,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
	Kewenangan Provinsi					
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.825.000	173.808.822	94,04	184.825.000	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.200.000	85.414.072	89,72	95.200.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	89.625.000	88.394.750	98,63	89.625.000	100,00
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	123.064.000	117.124.000	95,17	123.064.000	100,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.411.000	40.411.000	100,00	40.411.000	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	82.653.000	76.713.000	92,81	82.653.000	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	97.157.400	96.757.250	99,59	97.157.400	100,00
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	70.157.400	69.957.250	99,71	70.157.400	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.157.400	69.957.250	99,71	70.157.400	100,00
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	27.000.000	26.800.000	99,26	27.000.000	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	-	-	0,00	-	0,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	27.000.000	26.800.000	99,26	27.000.000	100,00
4.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		0,00	-	0,00
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	-	0,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	171.104.000	164.575.700	96,18	171.104.000	100,00
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	171.104.000	164.575.700	96,18	171.104.000	100,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	101.104.000	99.895.700	98,80	101.104.000	100,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	70.000.000	64.680.000	92,40	70.000.000	100,00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	273.633.200	238.981.600	87,34	273.633.200	100,00
6.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	220.825.600	217.309.100	98,41	220.825.600	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	74.250.000	73.356.000	98,80	74.250.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	146.575.600	143.953.100	98,21	146.575.600	100,00
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	52.807.600	21.672.500	41,04	52.807.600	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	52.807.600	21.672.500	41,04	52.807.600	100,00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	368.564.000	245.992.854	66,74	368.564.000	100,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
7.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	315.814.000	200.815.354	63,59	315.814.000	100,00
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	89.149.000	84.144.250	94,39	89.149.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	226.665.000	116.671.104	51,47	226.665.000	100,00
7.2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.750.000	45.177.500	85,64	52.750.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	52.750.000	45.177.500	85,64	52.750.000	100,00
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	39.440.000	38.036.500	96,44	39.440.000	100,00
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	39.440.000	38.036.500	96,44	39.440.000	100,00
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	-	-	0,00	-	0,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	39.440.000	38.036.500	96,44	39.440.000	100,00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	138.371.000	135.531.200	97,95	138.371.000	100,00
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	138.371.000	135.531.200	97,95	138.371.000	100,00
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga	73.326.000	71.786.700	97,90	73.326.000	100,00

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7	
	Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	65.045.000	63.744.500	98,00	65.045.000	100,00
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	44.410.000	44.256.000	99,65	44.410.000	100,00
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	44.410.000	44.256.000	99,65	44.410.000	100,00
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	44.410.000	44.256.000	99,65	44.410.000	100,00
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	-	-	0,00	-	0,00
	TOTAL	20.781.682.936	19.560.778.860	94,13	20.781.682.736	100,00

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk Renstra terbaru sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkankinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuaidengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
13. pelaksanaan koordinasi pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;

13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)”*. Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam “Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

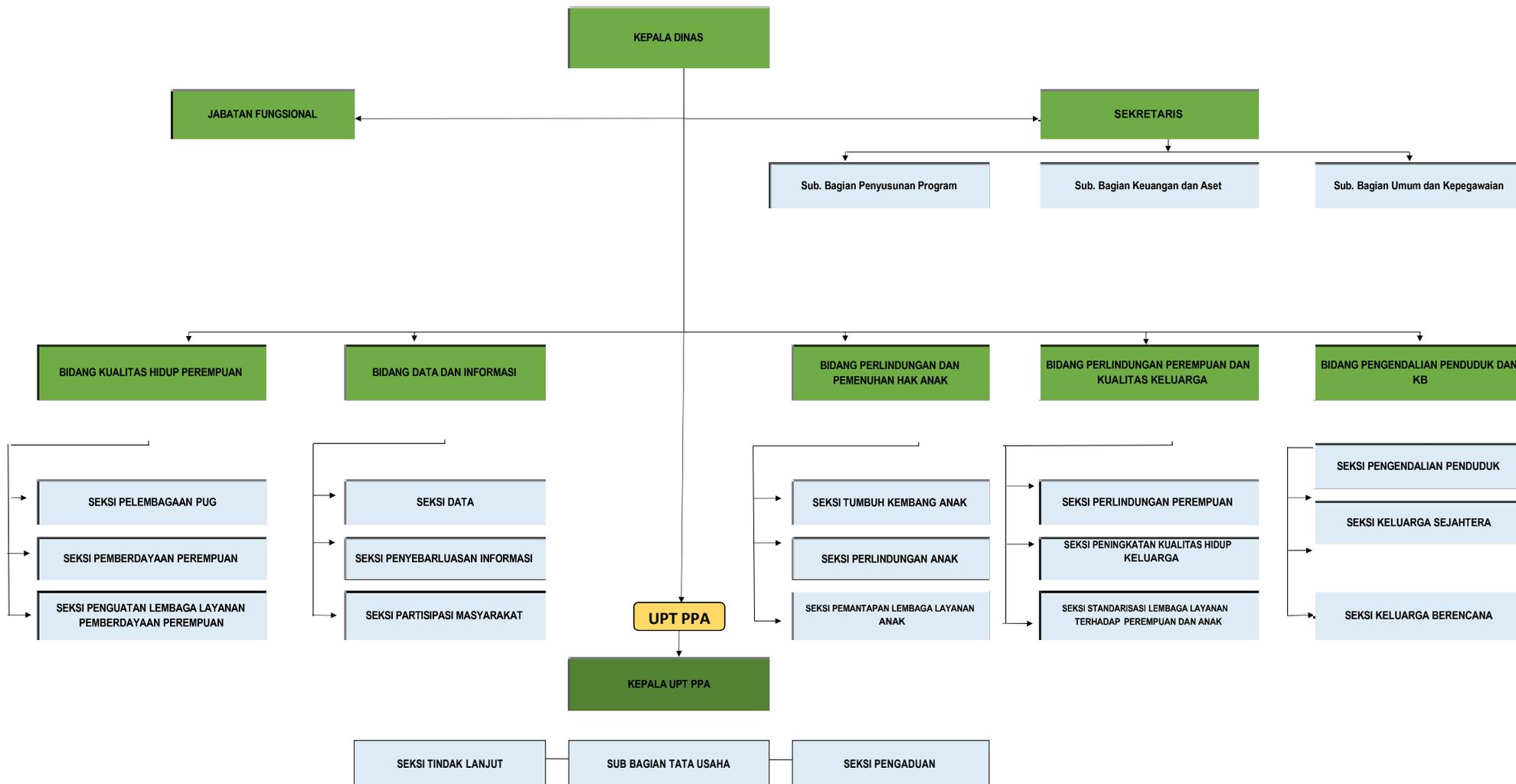
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Data
 - 2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi
 - 3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat

- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - 3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 - 3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - 3) Kepala Seksi Keluarga Berencana
- f. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)
 - 1) Seksi Tindak Lanjut
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengaduan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar 1.1 :

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per e sember 2021 disajikan terpilah laki-lakidan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	10	39	49
3.	PHL / Kontrak	12	11	23
Jumlah		25	50	62

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

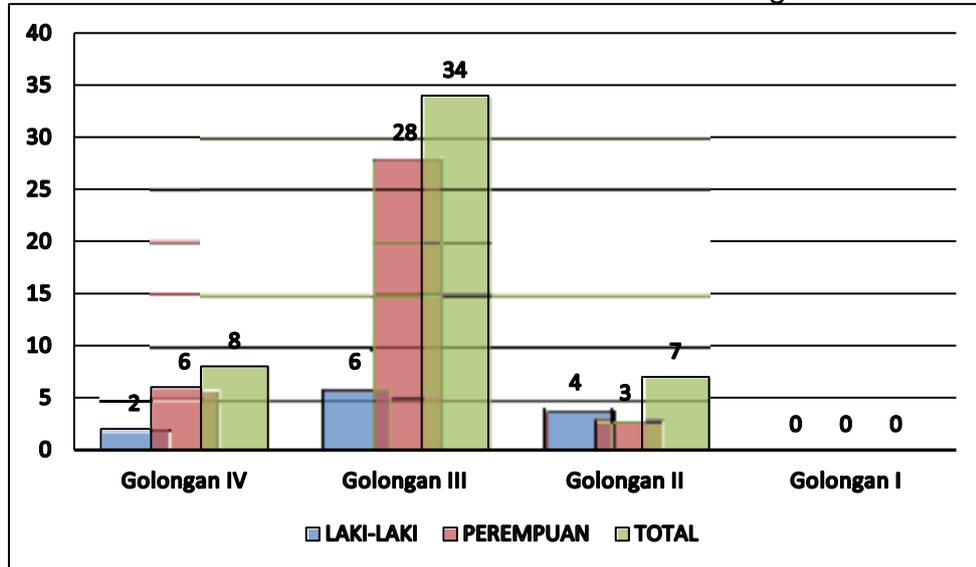
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	2	6	8
2.	Golongan III	6	28	34
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	40	52

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 1.2. Keadaan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APKKB Provinsi Kalimantan Tengah



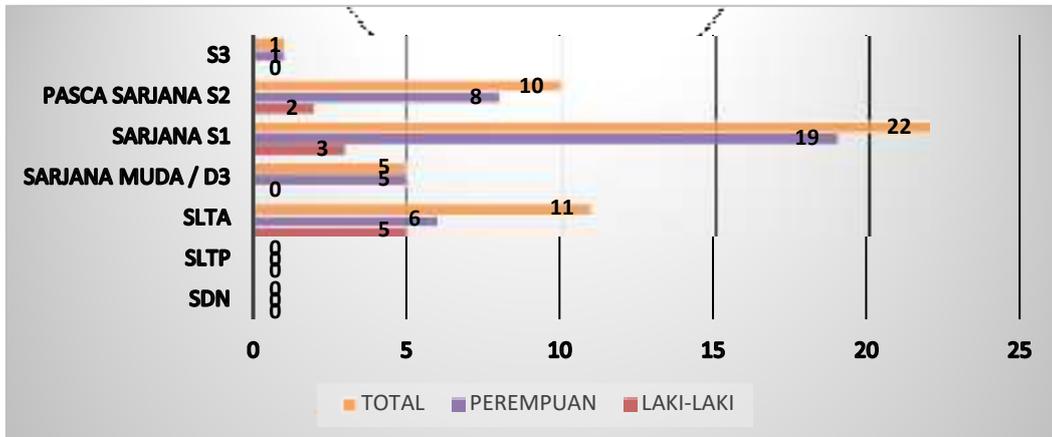
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Jumlah		Total	Total
		L	P		
1.	SDN	-	-	-	11
2.	SLTP	-	-	-	
3.	SLTA	5	6	11	
4.	Sarjana Muda / D3	-	5	5	27
5.	Sarjana S1	3	19	22	
6.	Pasca Sarjana S2	2	8	10	10
7.	S3	-	1	1	2
	Jumlah			49	49

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Gambar 1.3. Keadaan Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPKB

Provinsi Kalimantan Tengah



Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 46.55%.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	7	1	3	4
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	21	2	16	18
4.	Fungsional Tertentu	Esselon V	3	1	2	3
Jumlah			32	4	15	26

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Tabel 1.5

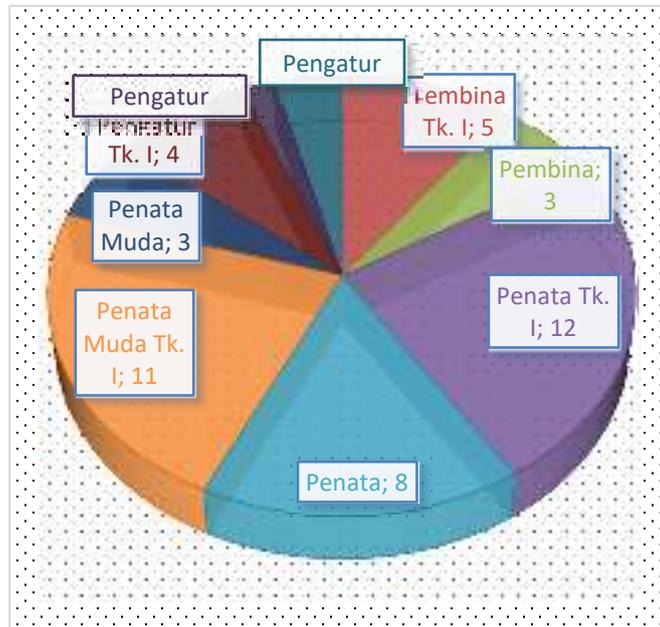
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	8
2.	Pembina Tk. I	IV / b	-	5	5	
3.	Pembina	IV / a	2	1	3	
4.	Penata Tk. I	III / d	1	11	12	34
5.	Penata	III / c	1	7	8	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	9	11	
7.	Penata Muda	III / a	-	3	3	

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
8.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	7
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	1	
11.	Pengatur muda	II / a	2	-	2	
12.	Juru	I / c	-	-	-	-
Jumlah			10	39	49	49

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Gambar 1.4. Keadaan Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya. Komposisi jumlah PNS Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 49 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel dan gambar di atas.

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2021				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	-	-	-	-	Produktif (30,61%)
2.	30 – 39 Tahun	2	13,33	13	86,67	15	30,61	
3.	40 – 49 Tahun	4	28,57	10	71,43	14	28,57	Umum (28,57)
4.	≥ 50 tahun	4	20,00	16	80,00	20	40,82	Kurang Produktif (40,82%)
Jumlah		10	20,41	39	79,59	49		

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (<40 tahun) di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tergolong minim atau sebesar 30,61%, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (>50 tahun) sebesar 40,82% dan sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 3 orang atau 6,12%, sehingga perlu untuk mempersiapkan permohonan pengadaan formasi CPNS baru di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Aspek Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2021 meliputi RPJMD 2016 – 2021, RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dan penetapan kinerja tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis SKPD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;

- e. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021;
- g. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 4 aspek yang menjadi gambaran umum kondisi daerah. Antara lain :

1. Aspek Geografis dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan ke 4 (empat) aspek tersebut perencanaan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam Aspek Pelayanan Umum pada “fokus pelayanan urusan wajib (non pelayanan dasar) “ bagian pemberdayaan perempuan dimana dijelaskan Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu

ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Peformulaan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 diformulakan sebagai berikut :

- Tujuan 1* Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Tujuan 2* Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Tujuan 3* Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Tujuan 4* Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Tujuan5* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan 6* Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan peformulaan tujuan, maka diformulakan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Peformulaan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
3.	Meningkatkan	Berkurangnya	Persentase

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	kasus kekerasan terhadap anak	Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
			Rasio anak korban kekerasan
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS Rata-rata jumlah anak per Keluarga
		Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
Rasio anak korban kekerasan		

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga
	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Utama Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah



REPUBLIK INDONESIA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 111-113 - 70137 Pangkal Raya

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan dan Fungsi: Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melalui Proses Pelaksanaan yang

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara pencapaian	Sumber data
1.	Peningkatan implementasi perencanaan gender	Perencanaan APBD pada program gender Lampiran APBD Perihal Gender	1. Analisis SWOT 2. Monev 3. Laporan 4. RTRM 5. Laporan 6. RTRM 7. RTRM	1. RTRM P3APKB 2. APBDDA JKTG 2021
2.	Penyediaan layanan kesehatan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
				1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara pencapaian	Sumber data
3.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
4.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
5.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
6.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
7.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara pencapaian	Sumber data
8.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
9.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
10.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
11.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
12.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara pencapaian	Sumber data
13.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
14.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
15.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
16.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB
17.	Peningkatan kualitas layanan keluarga	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 2. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 3. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 4. Jumlah kunjungan ke Puskesmas 5. Jumlah kunjungan ke Puskesmas	1. RTRM P3APKB 2. RTRM P3APKB

C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	38,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0123

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	25
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	0,0213
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	25
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,28
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,51

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

PENERIMA		PENYEDIA	
PENERIMAH: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan L. Triandhi, T. 205 - 22544 Pangkajene		PENYEDIA: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan L. Triandhi, T. 205 - 22544 Pangkajene	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021			
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penanggung jawab kinerja harus melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:			
NAMA: DR. NINA, TERESA KUMARAH, M. PAW JABATAN: KORVIR, BIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nama dan jabatan penanggung jawab pelaksanaan:		
NAMA: M. HARTONO KAWANAN JABATAN: KORVIR, BIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	Nama dan jabatan penanggung jawab pelaksanaan:		
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penanggung jawab kinerja harus melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:			
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penanggung jawab kinerja harus melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:			
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penanggung jawab kinerja harus melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:			
NAMA: DR. SOETIR KALISANTHAN YONGKAL	NAMA: DR. NINA, TERESA KUMARAH, M. PAW		
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penanggung jawab kinerja harus melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:			

PENERIMA		PENYEDIA		
PENERIMAH: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan L. Triandhi, T. 205 - 22544 Pangkajene		PENYEDIA: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan L. Triandhi, T. 205 - 22544 Pangkajene		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021				
NO	SUMBER KEANGGAPAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGKA 2021	2020
1	Melaksanakan Kebijakan dan Perencanaan Program	Capaian RAKD pada Bidang Keluarga Berencana	100%	100%
2	Melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
4	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
5	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
6	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Angka 2021	Angka 2020
1	Melaksanakan Kebijakan dan Perencanaan Program	Capaian RAKD pada Bidang Keluarga Berencana	100%	100%
2	Melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
4	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
5	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
6	Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Angka 2021	Angka 2020
7	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
8	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
9	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
10	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
11	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
12	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
13	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Angka 2021	Angka 2020
7	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
8	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
9	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
10	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
11	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
12	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%
13	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan KB dan keluarga berencana	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan syarat dalam melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian di analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil maka akan dijadikan dasar dalam penetapan target tahun berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, Tengah telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai. Ke sebelas sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis akan dilihat capaian kerjanya yang kemudian akan dibanding kan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan ataupun penurunan kinerja yang kemudian dibandingkan dengan target pada periode akhir masa RENSTRA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2020 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis pada RENSTRA 2016 – 2021.

Adapun Skema pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

SKEMA PENGUKURAN KINERJA DINAS DP3APPKB PROVINSI TAHUN 2020



Gambar 3.1

SKEMA PENGUKURAN KINERJA DINAS DP3APPKB

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan akan disimpulkan apakah berhasil atau belum berhasil masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Data dan informasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

3.1. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender

Yang menjadi tolak ukur capaian sasaran meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator yaitu Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng/ Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	3,00	2,3	76,67	3,43	2,93	85,42

Dari data tolak ukur capaian sasaran meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng, dimana Jumlah Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar 1.143.453.815.775 dan Jumlah Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebesar 2.091.642.713.496 . Untuk Jumlah Analisis Reponsif Gender pada Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebesar 33.463.981.007 dari 21 Program dan 26 kegiatan, dan pada tahun 2020 sebesar 63.970.374.258 dari 31 Program dan 65 Kegiatan . Untuk target pada 2020 sebesar 3,00 atau sebesar 70.700.858,97. Untuk realisasi pada tahun 2020 dengan perhitungan (63.970.374.258 /2.091.642.713.496) *100 = 3,09 %, sedangkan realisasi pada tahun 2021 dengan perhitungan (33.463.981.007 /1.143.453.815.775) * 100 = 2,93 %. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2020 dengan perhitungan (2,93 / 3,43) *100 = 85,42 %, sedangkan Capaian Indikator kinerja pada tahun 2020 dengan perhitungan (2,3 / 3,00) *100 = 76,66 % .

Untuk indikator sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng pada tahun 2020 mencapai target 76,66 % dengan dukungan anggaran pada dana APBD tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan 85,42 % dana yang ada di perangkat daerah yang dirasionalisasi di fokuskan pada pandemi covid-19 sehingga pada tahun 2021 mencapai target. Untuk indikator sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator persentase ARG pada Belanja Langsung APBD pada tahun 2021 dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi jumlah dana 114.938.000 realisasi 114.676.000 (99,77 %) menghemat anggaran sebesar 262.000 dengan capaian sasaran program 100 %

Daftar perangkat daerah beserta program dan kegiatan yang ARG pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Kegiatan ARG Tahun 2020

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Penyuluhan Sosial	Rp. 894.230.000
2	Badan Pengembangan SDM	Program Pendidikan kedinasan	Pendidikan Penjenjangan struktural	Rp.1.694.200.000
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelatihan Kejuruan Prosesing Pertanian	Rp. 60.000.000
4	Dinas Koperasi danUKM	-	Bintek Kewirausahaan bagi wira usaha baru	Rp.487.043.800

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		-	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah	Rp. 20.000.000
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab/kota	Sosialisasi Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD se-kalimantan	Rp. 385.000.000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaranyang tersedia tidak mencukupi-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Rp. 600.000.000
8	Dinas Perkimtan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.7.000.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.500.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.250.000.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.3.500.000.000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.150.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Rp.100.000.000
			Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Rp.92.450.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.50.000.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.170.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.50.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Rp.75.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.300.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp.187.500.000
			Penyediaan jasa informasi public dan website perangkat daerah	Rp.150.000.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	RP.147.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.100.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.80.000.000
		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Pembinaan Kesehatan Jasmani/Aparatur	Rp.50.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.100.000.000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Rp.25.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD	Rp.138.954.500
			Ekspose hasil-hasil Pembangunan Bidang	Rp.500.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan asset/Barang Daerah	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Rp.100.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Rp.50.000.000
			Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman	Rp.500.000.000
			Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.246.651.250
			Pendataan Rumah tidak Layak Huni	Rp.650.000.000
			Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lain Terkait Urusan Perumahan	Rp.100.000.000
			Penyulahan dan	Rp.205.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	
		Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU	Rp.100.000.000
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan	Bimbingan Teknis,Koordina si,Konsultasi, dan Sinkronisasidengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Pemerintah kab/kota yang Menangani Bidang Pertanahan	Rp.100.000.000
		Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Inventarisasi data Permasalahan Pertanahan	Rp.50.000.000
		Program Penatausahaan Pertanahan	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	Rp.201.709.000
		Program Perencanaan Kawasan Permukiman	Appraisal Survey dan Pengukuran	Rp.250.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfratraktur Kawasan Permukiman	Rp.704.000.000
			Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Bidang Kawasan Permukiman	Rp.185.350.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum KawasanPermukiman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.38.512.193.708
9	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan pengembangan sumberdaya aparatur	Seleksi penerimaan CAPRA IPDN	Rp.60.173.000
10	Dinas Kesehatan		Pertemuan Evaluasi Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp.123.740.000
			Supervisi Manajemen Pengendalian Hepatitis,Diare,I nspeksi, Saluran Perencanaan dan Ispe,Imunisasi	Rp.71.560.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Bintek dalam Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang	Rp. 77.840.000
			Pelayanan Operasi Katarak	Rp.509.650.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp.363.150.000
11	Bappedalitbang	Program Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
			Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-PG,GERMAS dan Pencegahan Stunting	Rp.200.000.000
			Kegiatan Dewan Riset Daerah	Rp.400.000.000
			Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
12	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Verifikasi desa Belum Berlistrik untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng	Rp. 300.000.000
13	Biro Protokol dan	-	-	Nihil

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Komunikasi Publik			
14	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	Tidak Terdapat Program /Kegiatan yang Khusus Terkait Anggaran Responsif Gender (ARG)
15	Dinas P3APPKB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Rp.52.793.700
23 Program			55 Kegiatan	Rp.54.523.881.9

Tabel 3.3
Program Kegiatan ARG Tahun 2021

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Rp. 256.217.500
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop	Rp. 181.640.800
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan	Rp.66.404.700
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan /Sub Kegiatan Pelaksanaan	Rp.1.044.189.107

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Rp. 65.000.000
		Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Pembentukan Kelompok dan Pelatihan Pemanfaatan Limbah hasil Perikanan di wilayah pesisir	Rp.90.000.000
		Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Pembinaan Kelompok wanita pengolah limbah hasil perikanan di kawasan wisata desa Ujung Pandaran	Rp.34.000.000
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp.74.684.000
5	Badan Kepagawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Seleksi Penerimaan CAPRA IPDN	Rp.165.000.000
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp.31.356.000
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik (Pembangunan PLTS) 13 Paket	Rp.12.000.000.000
		Program Pengelolaan KetenagaListrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat tidak mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Rp.200.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit	
			- Sosialisasi/koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Hortikultura	Rp.21.800.000
			- Pertemuan GHP	Rp.3.075.000
			- Fasilitasi bantuan bibit buah Jengkol, Matoa biji, Jeruk Okulasi, Bibit durian Okulasi	Rp.1.350.000.000
			- Pengawasan mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp.3.520.000.000
8	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembinaan Non PNS	Rp.5.946.600.000
9	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Pada SAMSAT Sekalimantan tengah Tahun Anggaran 2021	Rp.108.400.500
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Pemantapan Jejaring Kelembagaan)	Rp.62.898.200
			Kegiatan Capacity Building	Rp.41.330.000
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rp.4.500.000.000
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rp.270.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.1.455.223.200
13.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan (pelatihan kepemimpinan Administrator angkatan I) Peserta dari kabupaten/kota	Rp.885.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan (pelatihan kepemimpinan Pengawas angkatan I) Peserta dari kabupaten/kota	Rp.809.200.000
14.	Dinas Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp.281.962.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
15.	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	NIHIL		
16.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kalteng	NIHIL		
		21 Program	26 Kegiatan	Rp.33.463.981.007

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Perlunya Komitmen yang kuat terhadap peraturan yang ada terhadap SOPD . Karena ada Peraturan tentang PPRG di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Gubernur, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja PUG tetapi untuk rencana dan laporan kelompok kerja sangat minim.
- c. Adanya Rasionalisasi anggaran yang dialihkan ke Covid 19 dan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak masuk ke dalam IKU SOPD
- d. Masih sangat kurang ketersediaan sumber daya manusia yang sudah mengikuti TOT, Fasilitator PUG dan PPRG . Dan minimnya anggaran dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
- e. profil gender dan data terpilah masih sangat kurang dan perlu diwajibkan membuat data terpilah sebagai informasi dalam menyusun program.
- f. Belum adanya regulasi teknis yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Masih rendahnya komitmen para pemangku kebijakan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahan gender.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran;
- g. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan

- perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG.
- b. Memperbanyak fasilitator di daerah agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan sampai pada tingkat kabupaten/kota, dan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang responsif gender.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan PUG khususnya bagi internal Dinas PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SDM dari Perangkat Daerah strategis lainnya.
- d. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG bidang Politik, Sosial dan Hukum di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja;
- e. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG;
- f. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan PUG
- g. Penguatan Kelembagaan PUG melalui Pembentukan POKJA, gender focalpoint dan bentuk jejaring kerja lainnya
- h. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.
- i. Memotivasi kelompok kerja PUG yang sudah terbentuk agar menyusun rencana kerja tahunan dan membuat laporan kelompok kerja PUG

3.2 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga

Dalam pencapaian meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat dari table dibawah

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2020			2021			Ket
			T	R	%	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase perempuan di lembaga		Jumlah perempuan di lembaga	28,89	35,55	100	35,56	35,56	100	Sumber Data : BPS

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2020			2021			Ket
			T	R	%	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
legislatif		legislatif							Kalteng
	Persen	(DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100							dalam angka 2020
Persentase Sumbangan pendapatan		Jumlah Sumbangan pendapatan dibagi total pendapatan dikali 100	33,41	33,40	99,97	33,46	33,63	100	Sumber Data : BPS 2019

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk tolok ukur capaian sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terdiri dari 2 indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan di lembaga legislative

jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Tabel 3.5

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan JenisKelamin

NO.	NAMA PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Partai Nasional Demokrat	4	1	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	4
3	Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan	7	5	12
4	Partai Golkar	4	3	7
5	Partai Gerindra	3	2	5

NO.	NAMA PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	Partai Demokrat	5	1	6
7	Partai Amanat Nasional	1	1	2
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
9	Partai Hanura	1	1	2
10	PKP Indonesia	1	-	1
Jumlah		29	16	45

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator : Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan 33,56 % realisasinya 33,56 % Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah dimana partisipasi wanita sangat besar mengingat ditetapkannya model pembangunan yang berbasis pada masyarakat. wanita memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pria, maka sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di tingkat keluarga, indikator ini menjadi salah satu variabel pengukuran dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada dimensi “Kehidupan yang layak” IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Dengan dukungan anggaran berjumlah 1.426.673.400 dengan realisasi 1.403.370.460 (98, 37 %) menghemat anggaran 23.302.940 dengan capaian kinerja 100 %

Tabel 3.6

Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 – 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumbangan pendapatan perempuan (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Tengah	33.13	33.26	33.26	33.39	33,39	33,40	33,63
Kotawaringin Barat	23.02	23.21	23.21	23.55	23,69	23,93	24,24
Kotawaringin Timur	25.42	25.82	25.82	25.77	25,85	25,87	26,13
Kapuas	28.05	27.04	27.04	27.57	27,75	27,78	27,69
Barito Selatan	38.30	38.05	38.05	38.11	38,15	38,16	38,36
Barito Utara	42.72	43.72	43.72	43.73	43,71	43,76	43,93
Sukamara	18.61	19.07	19.07	19.47	19,74	19,98	20,11
Lamandau	25.72	27.71	27.71	27.81	27,87	27,90	28,12
Seruyan	26.01	26.62	26.62	26.98	27,07	27,12	27,52
Katingan	28.89	28.99	28.99	29.37	29,56	29,69	29,65
Pulang Pisau	22.15	22.48	22.48	22.94	23,15	23,18	23,10
Gunung Mas	55.83	51.33	51.33	51.04	50,11	49,83	49,92
Barito Timur	41.89	43.37	43.37	43.43	43,34	43,46	43,73
Murung Raya	28.83	29.39	29.39	29.35	29,34	29,37	29,70
Kota Palangka Raya	31.40	31.87	31.87	32.10	32,22	32,28	32,63

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender guna meningkatnya partisipasi perempuan, antara lain adalah :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan gender.
 - c. Terbangunnya kaukus perempuan, serta jejaring kemitraan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Implementasi kebijakan afirmatif terhadap perempuan belum sepenuhnya di tindak lanjuti.
- b. Budaya patriarki
- c. Masih rendahnya kualitas perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi

Tantangan / Hambatan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga antara lain :

- a. Belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
- b. Perbedaan gender yang terlihat dari kecenderungan peran masing masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumah tanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga

sekaligus pencari nafkah.

- c. Pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat.
- d. kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik.
- e. Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suami/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.
- f. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.
- g. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya
- h. Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik,

sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.

- i. Motivasi dari para perempuan untuk lebih terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Karena kebanyakan pendidikan politik yang diberikan saat ini terjadi ketika mendekati masa-masa pemilu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas para caleg terutama perempuan masih dibawah standard. Dengan diberikannya pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari perempuan itu sendiri, terutama di bidang politik. Dengan adanya peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat tidak kalah dari laki-laki.
- b. Diperlukan pendekatan pemahaman kepada laki-laki terutama dalam keluarga dalam memahami peran dan posisi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga.

Dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah yang merupakan Indikator dalam pencapaian Kinerja RPJM, dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.7
Data Indikator ID dan IPG Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2020		2021		
		T	R	T	R	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,67	83,20		85,42	Sumber data : BPS Formula : $1/3[Xede(1)+Xede(2)+Linc-Dist]$ Xede(1)=Xede untuk harapan hidup Xede(2)=Xede untuk pendidikan Linc-Dist=Indeks Distribusi pendapatan
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,88	89,09			Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2019 Formula : $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

Gender adalah Pembedaan Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab dan pembagian kerja antara Laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma , adat istiadat ,kepercayaan atau kebiasaan masyarakat . Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal.

Kualitas Sumber Daya manusia menjadi salah satu factor penentu daya saing Negara . Berdasarkan komposisi jumlah penduduk, SDM laki-laki dan perempuan hamper setara. Artinya Perempuan menentukan separuh dari pencapaian pembangunan manusia. Untuk meningkatkan daya saing Negara melalui pembangunan manusia , sebuah Negara perlu meningkatkan kesetaraan gender yaitu

meningkatkan hak, tanggung jawab ,kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki- laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam mengukur pembangunan manusia dengan memasukan aspek gender , terdapat dua indicator yang digunakan , yakni :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan
 Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Dimensi Pengukuran IPG

Dimensi	Indikator	IPG/GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Tabel 3.9
Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jeniskelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • IPG harus dianalisis bersama IPM • Selisih IPGdg IPM merupakan gap capaian gender • Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki- laki • Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> a. IPG dapat diinterpretasikan sendiri b. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi c. antara perempuan dengan laki-laki d. e. IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki f. IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki g. IPG > 100, capaian perempuan > capaianlaki-laki

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki , tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memilki peranan yang proposional dalam hal : pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintah, dan kehidupan ekonomi khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga .

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan cara mengukur

ketimpangan gender di bidang ekonomi , partisipasi politik dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG diukur berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponentersebut.

Tabel 3.10
Dimensi Pengukuran IDG

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari Pejabat Tinggi ,manajer, , pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan IndeksPemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan capaian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 -2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian IDG dan IPG 2014 - 2019

Provinsi / Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KALTENG	89.33	89.25	89.07	88.91	89,13	89,09		77.87	78.23	79.36	77,03	83,20	82,41
KOBAR	90.04	90.04	-	91.76	91,76	91,69		63.98	-	63.31	59.72	64,11	65,43
KOTIM	86.07	86.79	-	87.73	87,74	87,91		70.23	-	67.87	67,35	67,36	69,52

Provinsi / Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kapuas	95.36	95.65	-	96.59	96,26	95,51		68.21	-	71.50	75,34	73,8 1	73,3 3	
BARSEL	93.46	93.34	-	93.02	92,35	92,04		83.88	-	81.67	83,19	86,3 3	86,0 5	
BARUT	85.50	85.62	-	85.16	85,89	87,15		84.35	-	86.20	84,52	85,3 5	85,0 2	
Sukamara	90.14	90.09	-	91.24	91,45	90,84		61.2 4	-	59.78	65,7 7	66,3 6	66,0 2	
Lamanda u	91.06	91.55	-	91.9 7	91,8 8	91, 9 0		53.5 5	-	54.1 3	54,9 8	71,0 6	71,2 6	
Seruyan	88.87	88.42	-	88.6 4	89,4 6	89, 4 4		69.7 0	-	70.1 3	70,0 7	62,8 3	63,2 0	
Katingan	83.88	84.78	-	85.5 1	85,7 0	85, 5 7		60.7 9	-	66.8 7	73,3 2	66,5 7	66,3 6	
Pulang Pisau	90.27	90.25	-	91.7 0	91,7 2	92, 1 0		69.3 8	69.3 2	-	74, 1 3	70,3 6	70,6 3	
Gunung Mas	91.80	92.00	-	91.7 4	91,8 9	92, 1 0		81.0 1	79.9 8	-	82, 7 3	88,9 1	88,2 2	
Barito Timur	87.75	88.16	-	88.3 6	88,4 1	88, 7 6		66.0 1	75.8 0	-	76, 5 0	82,6 7	81,9 8	
Murung Raya	81.53	82.31	-	82.9 2	83,2 3	83, 4 1		65.1 6	65.8 2	-	67, 3 8	68,1 0	68,2 1	
Kota Palan gka Raya	93.80	94.30	-	94.4 2	94,6 6	94, 9 6		79.5 9	79.8 3		80, 6 1	78,9 5	79,1 2	

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Tengah pada tahun 2019 berada pada peringkat 24 dari 34 Provinsi , naik satu peringkat dari tahun sebelumnya . dan hanya 5 Kabupaten /kota yang memiliki IPG dibawah I Dalam PG Provinsi yaitu Barito Timur, Kotawaringin Timur, Barito Utara , Katingan dan Murung

Raya. Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pada tahun 2020 IDG Kalimantan Tengah berada pada peringkat 1 dari 34 Provinsi , naik dari dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kabupaten /kota yang memiliki IDG diatas IDG Provinsi yaitu Gunung Mas , Barito Selatan dan Barito Utara . Ini merupakan keberhasilan Kalimantan Tengah dalam komitmen yang luar biasa dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah.

3.3 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Dalam pencapaian sasaran berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Sasaran 3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	persen	0,0182	8,5097	0.085	0,0151	0,0151	100

Sumber Data : Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Di satu sisi apabila memperhatikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 , terdapat peningkatan sebanyak 180 kasus dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap tindakan promotif preventif pemerintah dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah laporan terhadap kasus KDRT ke lembaga atau unit layanan. Namun disisi lain masih tingginya jumlah kasus memerlukan perhatian yang serius dalam usaha penanganannya, dengan mempertimbangkan

jumlah dan kompetensi SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat terutama perempuan dan anak. Dengan tercapai target sasaran pada tahun 2021 dilihat efektifnya UPT Perlindungan perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah berdiri dimana masa pandemi covid-19 anggaran sangat minim tapi bisa mencapai target pelayanan 100% yang ada, kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan dana yang tersedia sebesar 184.825.000 anggaran yang terpakai 173.808.822 ada dana yang dikembalikan ke negara sebesar 11.016.178 (94,04 %) dapat mencapai target sasaran pada tahun 2021.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Faktor Penentu Keberhasilan/ Kegagalan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Perlu adanya SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Sarana dan Prasarana penunjang kerja yang kurang memadai.
- c. Pemberdayaan SDM di Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
- d. Kapasitas SDM dan Kompetensi yang belum memadai dalam penanganan kasus.
- e. Jumlah SDM yang memberikan layanan pada korban kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah tidak memadai mengingat jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilayani.
- f. Dukungan ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan layanan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Adanya Rasionalisasi anggaran yang dialihkan ke Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.
- h. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan di daerah (Kabupaten/Kota) yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahan perlindungan perempuan.
- i. Belum terbentuknya UPTD PPA di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan.

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 5. Pergub No 60 Tahun 2019 Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memudahkan dalam memberikan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan. Program tersebut antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 4) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan.
- c. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosial media, yang tidak diimbangi pengawasan dari orang tua.
- d. Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- e. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum optimal.
- f. Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata.
- g. Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan.
- h. Belum terbentuknya UPTD PPA di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
- b. Membentuk kelompok masyarakat yang peduli dan mau membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Pengawasan orang tua perlu ditingkatkan dalam mengawasi anak dalam bermedia sosial
- d. Mengoptimalkan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif.
- e. Pendataan Pelaku Ekonomi Perempuan sektor informal secara berkala.
- f. Membuka dan memberikan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan secara merata.
- g. Melakukan advokasi kepada kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum membentuk UPTD PPA.
- h. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kompetensinya dalam penanganan kasus agar layanan terhadap korban kekerasan dapat diberikan tepat.
- i. Penambahan jumlah SDM yang memberikan layanan pada korban kekerasan

pada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah mengingat jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilayani.

- j. ketersediaan anggaran yang memadai untuk memaksimalkan layanan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.4 Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Termasuk TPPO

Tabel 3.13

Indikator Kinerja Sasaran 4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	persen	100	100	100	100	100	100

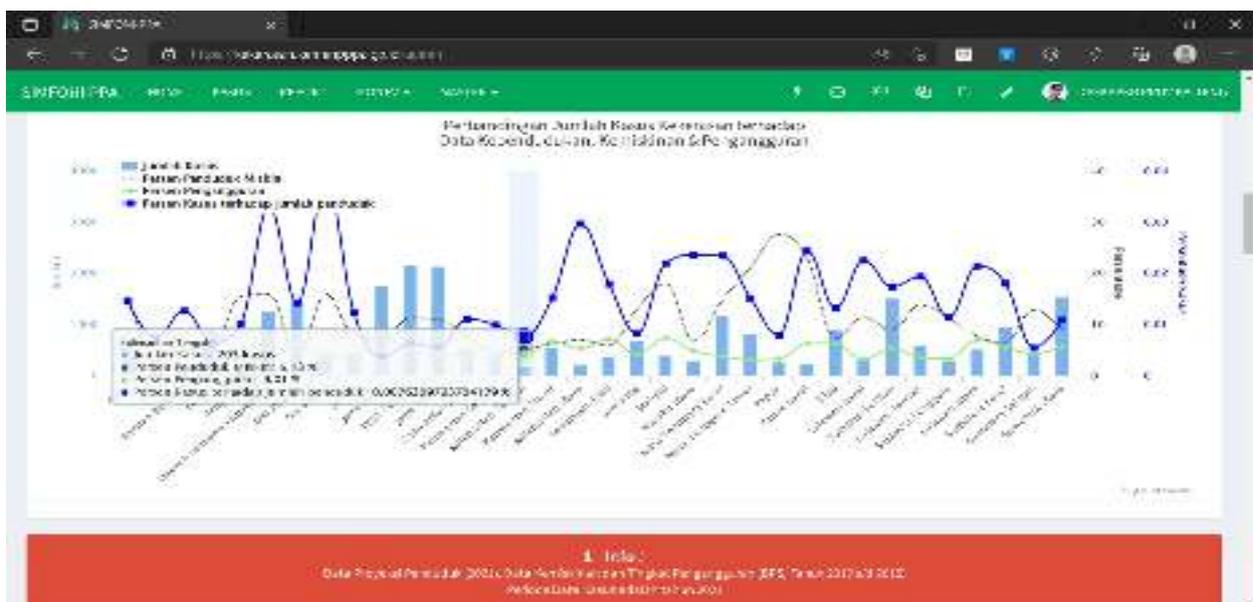
Sumber Data : Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dilihat dari capaian rasio kekerasan terhadap perempuan mencapai target baik pada tahun 2020 maupun 2021 dimana dapat terlayannya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Tengah capaian pada tahun 2020 sebesar 100 % dan pada tahun 2021 sebesar 100 %. Dimana beberapa kegiatan yang mendukung pada anggaran APBD pada tahun 2021 walaupun masa pandemi covid 19 tapi masih ada kegiatan yang lebih efektif yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana 231.422.400 realisasi ada 230.728.000 dana menghemat sebesar 694.400 dengan capaian 99,70 % mencapai target untuk indikator sasaran

Tabel 3.14
Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2021

No	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Total
1	Barito Selatan	18	10	10	8	9	80	90	85
2	Barito Timur	4	1	3	1	0	100	0	25
3	Barito Utara	12	1	10	0	2	0	20	18,18
4	Gunung Mas	2	0	2	0	2	0	100	100
5	Kapuas	33	9	30	5	29	55,56	96,67	87,18
6	Katingan	7	1	8	1	1	100	12,5	22,22
7	Kota Palangkaraya	48	10	36	9	35	90	97,22	95,65
8	Kota Waringin Barat	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Kota Waringin Timur	21	5	15	5	14	100	93,33	95
10	Lamandau	10	1	10	1	10	100	100	100
11	Murung Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pulang Pisau	12	4	8	4	8	100	100	100
13	Seruyan	2	1	1	0	0	0	0	0
14	Sukamara	9	1	5	1	1	100	20	33,33
TOTAL		180	46	138	35	111	76,09	80,43	79,35

Gambar 3.3
Data Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Data Kependudukan, Kemiskinan dan Pengangguran



Sumber: Data Simfoni PPA Tahun 2021

Tabel 3.15
Data Jumlah Perempuan di Provinsi Kalimantan

Kabupaten/Kota	SP2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	140 537	129 851	270 388
Kotawaringin Timur	222 617	206 278	428 895
Kapuas	211 973	198 473	410 446
Barito Selatan	67 113	64 027	131 140
Barito Utara	80 473	74 339	154 812
Sukamara	33 387	30 077	63 464
Lamandau	52 143	45 468	97 611
Seruyan	86 211	76 695	162 906
Katingan	84 278	77 944	162 222
Pulang Pisau	70 180	64 319	134 499
Gunung Mas	71 378	63 995	135 373
Barito Timur	58 112	55 117	113 229
Murung Raya	57 948	53 579	111 527
Palangka Raya	149 355	144 102	293 457
KALIMANTAN TENGAH	1 385 705	1 284 264	2 669 969

Sumber : Data BPS Kalimantan Tengah Tahun 2020

Tabel 3.16
Data Kekerasan Yang Ditangani Upt Ppa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Jenis Pengaduan (Kasus)	Klasifikasi Pelapor/Korban Menurut Umur			Klasifikasi Korban Menurut Jenis Kelamin	
		0 - 17	18 - 24	25 - 59	L	P
1	Penalantaran	4	-	5	3	6
2	Kekerasan Fisik	3	-	1	-	4
3	Pencabulan dan Persetubuhan	3	-	-	-	3
4	Kekerasan Seksual	4	-	-	-	4
5	ABH	-	-	1	1	-
6	Kekerasan Psikis	8	-	3	2	9
7	Pencabulan anak di bawah umur	7	-	-	1	6
8	Hak Asuh	2	-	3	2	3
9	KDRT	5	-	1	1	5
10	Pemeriksaan	1	-	1	-	2
11	Perebutan Hak Asuh Anak	2	-	-	-	2
12	Pencabulan	1	-	1	-	1

No	Jenis Pengaduan (Kasus)	Klasifikasi Pelapor/Korban Menurut Umur			Klasifikasi Korban Menurut Jenis Kelamin	
		0 - 17	18 - 24	25 - 59	L	P
13	Pelecehan Seksual	1	1	-	-	2
14	Persetubuhan Anak di bawah umur	4	-	-	1	3
15	Penelantaran Anak	4	-	-	1	3
16	TPPO	1	-	-	1	-
	Jumlah	74			74	

TABEL 3.17
JUMLAH KASUS YANG MENDAPAT LAYANAN DI UPT PPA

INFORMASI JUMLAH KASUS			JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH PELAKU BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH KORBAN BERDASARKAN USIA		JUMLAH PELAKU BERDASARKAN USIA	
Informasi jumlah kasus	Jumlah korban	Jumlah pelaku	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
54	54	50	7	47	47	3	40	14	2	48

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS LAYANAN YANG DITERIMA					KERJA SAMA DENGAN INSTANSI / ORGANISASI / JEJARING TERKAIT DALAM PENANGANAN KASUS						
Pendampingan Hukum	Pendampingan Psikologi	Saksi ahli	Mediasi	Rumah aman	Polda	Polres	Peradi	Dinsos Kota	Dinas Kota	Kementerian PPA	
8	37	11	0	0	7	3	4	4	8	1	

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS KEKERASAN				JUMLAH KORBAN BERDASARKAN BENTUK KEKERASAN							PENERIMAAN KASUS MELALUI RUJUKAN ANTAR PROV / KAB / KOTA		
Psikis	Seksual	Fisik	Penelantaran	Persetubuhan	Pencabulan	Pelecehan	KDRT	Penelantaran	Hak asuh anak	TPPO	Kota	Kab	Provinsi
54	23	7	9	3	17	3	7	7	2	1	15	16	8

Sumber Data : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, yaitu :

- a. Regulasi pada unit layanan lain yang terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian yang memiliki prosedur dan tata layanan masing-masing.
- b. Perubahan struktur jabatan di unit layanan terkait.
- c. Kurang maksimalnya unit layanan pada Kabupaten/Kota
- d. Terbatasnya fasilitas guna penjangkauan kasus
- e. Masih kurangnya Kapasitas dan Kuantitas SDM pada unit layanan terbatas, dimana pada unit layanan sangat dibutuhkan tenaga profesional yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian, dan pada unit layanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah tenaga profesional masih sangat jarang terutama yang memiliki sertifikat keahlian dalam hal mediasi dan konseling.
- b. Masih Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi data dasar guna formulasi kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan perempuan
- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadidalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan perempuan, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi- informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

- kekerasandalam rumah tangga
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dankorban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
- b. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- a. Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antarlain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangandari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan

masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan sosial
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bagi internal Badan PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan mengikutsertakan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi
- h. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- j. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

3.5 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pencapaian indikator sasaran lima untuk berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada indikator capaian 2 (dua) tahun ini :

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Sasaran 5

ASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	35,71	42,71	83,33	42,86	28,57	66,62
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,182	1,0082	18,05	0,0151	4,26	282,12

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APPKBProvinsi Kalteng

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menjalankan perannya guna memastikan adanya peningkatan akses anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan peningkatan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Demi terwujudnya kondisi yang ideal yang menjadi tujuan bersama, dimana hak anak dapat terpenuhi, pandangan anak mendapatkan penghargaan, serta anak terlindungi. Perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mewujudkan bebasnya anak dari berbagai diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang salah serta mampu memenuhi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dibidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lingkungan bagi tumbuh kembang anak yang optimal, untuk itu dikembangkan kebijakan dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Selain itu kebijakan lain yang terus diupayakan untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Partisipasi anak dalam kebijakan tersebut diartikan sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan

yang berhubungan dengan anak, secara langsung maupun tidak langsung, dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2021 ditetapkan sasaran strategis Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

Indikator : Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama

Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang diukur melalui 5 (lima) klaster sebagai berikut :

- Klaster I : Hak sipil dan Kebebasan
- Klaster II : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Klaster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- Klaster V : Perlindungan khusus

Guna menentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di laksanakan evaluasi secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menentukan pada tingkatan mana capaian Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kaabupaten/Kota Layak Anak yang ditunjukkan dengan skor dengan kriteria sebagai berikut :

Gambar 3.3
Tingkatan KLA



Dimana skor pada masing-masing tingkatan ditentukan berdasarkan kriterian capaian pada tahun 2019 terhadap :

- Kelembagaan 100 point
- Klaster I 125 point
- Klaster II 180 point
- Klaster III 150 point
- Klaster IV 130 point
- Klaster V 215 point
- Kecamatan 25 point
- Desa/Kelurahan 75 point
- Total 1000 point

Gambar 3.4
 Nilai KLA Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel 3.19
 (Empat) Kabupaten yang memperoleh penghargaan KLA tingkat Pratama tahun 2021

Kabupaten	Nilai	Tingkat
Kobar	572,14	Pratama
P.Raya	526,03	Pratama
Lamandau	519,95	Pratama
Katingan	504,81	Pratama

Tabel 3.20
Data Kekerasan Terhadap Anak 2020 - 2021 pada data SIMPONI KPPPA

KABUPATEN	2020	2021
BARTIM		13
BARUT	7	6
BARSEL	5	14
MURA	3	18
PULPIS	10	10
KAPUAS		25 (3 org disabilitas)
P.RAYA	15	11
KATINGAN	10	15
KOTIM	10	18
KOBAR	11	17
SERUYAN	25	8
LAMANDAU	11	21
SUKAMARA	4	9
GUMAS	5	0
jumlah	116	160

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DinasP3APPKB Provinsi Kalteng

Dari target rasio anak korban kekerasan di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mencapai target 100% dimana kasus yang dilaporkan di UPT Perlindungan Perempuan dapat dilayani dengan baik dan dapat diselesaikan. Dana yang mendukung kegiatan tersebut berjumlah **368.564.000** dana yang terpakai **245.992.854 (66,74 %)** ada kelebihan dana yang dikembalikan ke negara berjumlah **122.571.146** dengan capai target indikator berhasil dicapai 100 % .

3.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak

Dalam pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas layanan perlingkungankhusus kepada anak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.21
Indikator Kinerja Sasaran 6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	51,92	100	100	84,62	84,62

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak di Kalimantan Tengah mencapai target 100 % sama seperti tahun 2019, dimana dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan di lihat target sasaran khusus pada anak korban kekerasan alaupun di masa pandemi covid-19 ini pelayanan terus berjalan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan anggaran tahun 2021 berjumlah 170.000.000 dan terpakai sebesar 130.611.576 ada kelebihan dana yang dikembalikan ke negara berjumlah 39.388.424 dengan capaian mencapai target 84,62 % .

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang tuntas pada unit layanan UPT-PPA dibagi dengan

jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di kali 100, pada tahun 2021 tercatat 156 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sasaran “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak” dan “Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak” yaitu :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam beragam bentuk, seperti advokasi kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggugah komitmen terhadap perlindungan hak anak.
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan.
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan anak.
- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan anak, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksidan korban;
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- b. Sudah terbentuknya Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi *mainstream* pemahaman para pemangku kepentingan;
- b. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan;

- d. Masih kurangnya koordinasi kebijakan anak antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Belum optimalnya evaluasi kebijakan anak sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait anak.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan anak melalui pelatihan-pelatihan dan diklat teknis penyusunan data anak.
- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak

Dalam pencapaian sasaran dalam meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.22
Indikator Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentas e PD yang memiliki Sistem data gender dan anak	Persen	13,33	11,11	83,34	15,56	15	100

Sumber Data; Bidang Data dan Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dari data data diatas terjadi penurunan dari tahun 2020 sebesar 83,34 9% dan pada tahun 2021 sebesar 100 % dimana pada tahun 2021 ini pandemi covid 19 di Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2021, ada 43 Perangkat Daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai yang memiliki data terpilah dan telah dituangkan kedalam SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang dapat diakses pada SIGA Kalteng dengan alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/>. Melihat kondisi pandemi covid-19 ini dengan dana yang minim hampir di semua perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Tengah capaian 100 % merupakan keberhasilan di kondisi pandemi covid-19. Dengan dana yang minim di Dinas P3APPKB untuk kegiatan Data dan Gender sebesar 305.657.400 dengan realisasi 305.657.000 (97,1 %) dengan menhemat anggaran sebesar 8.233.450.

Adapun Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak merupakan rincian dari jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sistem data gender dan anak atau dengan kata lain telah memiliki data terpilah dan telah dituangkan kedalam SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang dapat diakses pada SIGA Kalteng dengan alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/> pada tahun 2021 tercatat 43 Perangkat Daerah telah memiliki Data Gender dan anak dengan penjelasan sebagai berikut :

Dimana jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2021, ada 43 Perangkat daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah .

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta implementasi data gender sebagai data sektoral pada lingkup kewenangannya asing-masing.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing melalui

tersedianya dataterpilah gender.

- d. Terbangunnya Sistem Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses pada alamat url : www.dp3appkb.kalteng.go.id dimana didalamnya termuat aplikasi teknis SistemInformasi Gender dan Anak yang memuat informasi data terpilah gender dan anak sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Belum adanya regulasi yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota serta kebijakan data gender
- b. Masih rendahnya komitmen para penentu kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu gender yang ada yang berpengaruh pada ketersediaan data terpilah gender
- d. Keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan
- e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender
- f. Sistem Informasi masih berkembang dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- b. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- d. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- e. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG yang tentunya disertai ketersediaan data terpilah gender sebagai data awal /data pembuka wawasan dalam analisis gender.
- b. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak pada di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja
- c. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam

- rangka implementasi PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak
- d. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan anak
 - e. Penguatan Kelembagaan Data Gender
 - f. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

3.8 Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran

Dilihat dari capaian meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran untuk dua tahun dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.23
Indikator Kinerja Sasaran 8

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Persen	B+	B+	100	B+	B+	100

Sumber Data : Subag Penyusunan Program Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi organisasi maka Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Sehingga disusunlah Sasaran Strategis “Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”. Untuk sasaran dan indikator mencapai target 100% untuk tahun 2021 ada peningkatan dari tahun sebelumnya dimana ada perbaikan dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi dimana capaian yang dicapai pada sebesar 70,57 dengan kategori **BB (Sangat Baik) Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**. Dapat disimpulkan bahwa telah melakukan langkah-langkah perbaikan sejalan hasil rekomendasi evaluasi laporan kinerja pada periode sebelumnya, seperti antara lain pembuatan SOP, penilaian kinerja dan monitoring pencapaian target kinerja secara berjenjang (mulai dari eselon IV) sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Namun masih ada perbaikan yang harus dilakukan, antara lain terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, capaian target yang belum terpenuhi, dan hubungan antara Renstra PD terhadap pencapaian fokus kinerja RPJMD. Dan anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian tersebut sebesar 20.781.682.936 dengan realisasi 14.124.598.905 (94,98 %) ada menghemat dana sebesar 1.220.904.076 dengan capaian sasaran 100%.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran terdiri dari 1(satu) indikator yaitu

:
Indikator : Hasil Penilaian SAKIP

Nilai ini didapatkan dengan rumus : $\text{Nilai Capaian SAKIP} / \text{Nilai Capaian Minimal SAKIP}$ sesuai Target.

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Sumber : Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya jumlah personil
 - b. Perlunya peningkatan SDM dalam penilaian kinerja
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi.
 - e. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi
 - f. Kurangnya komitmen internal organisasi dalam pencapaian indicatorsasaran
- d. Adanya keterbukaan informasi yang tersampaikan melalui **Website DP3APPKB : www.dp3appkb.kalteng.go.id**

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan organisasi, antara lain adalah :
 1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
 4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Komitmen dalam pelaksanaan kinerja sudah terbentuk
- c. Motivasi yang tinggi dalam membangun organisasi
- d. Perubahan fungsi dari koordinasi menjadi pelayanan khususnya dalam

perlindungan perempuan dan anak dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
- 5) Program-program teknis dalam pencapaian indikator kegiatan
- 6) Adanya penghargaan kepada pejabat eselon III yang telah mencapai target dalam bentuk surat dari Kepala Dinas.

Tantangan / Hambatan

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara umum , antara lain :

- a. Berkembangnya sistem kebijakan pemerintahan menuntut profesionalisme para aparatur dalam berkinerja
- b. Pengelolaan kinerja organisasi yang menuntut perlunya pengawasan, kontrol,serta tindak lanjut yang berkesinambungan
- c. Antusias aparatur terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi dalam organisasi, terkadang mempengaruhi kinerja.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas serta pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang dimulai dari unit terkecil dalam organisasi, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kapasitas dan kinerja aparatur
- b. Dilakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja aparatur, serta pemberlakukan *punishment* dan *reward* terhadap aparatur.
- c. Meningkatkan tatakelola organisasi yang baik
- d. Peningkatan Sumber Daya manusia dalam penguatan kapasitassesuai dengan kompetensinya.

3.9 Menurunnya Angka Kelahiran

Dilihat dari capaian sasaran menurunnya angka kelahiran untuk dua tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Indikator Kinerja Sasaran 9

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,19	2,24	97,76	2,24	2,24	100
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1	1	100	1	1	100

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Dilihat data di atas didapatkan untuk sasaran menurunnya angka kelahiran untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Angka kelahiran total per WUS dan Rata-rata jumlah anak per Keluarga. Dan ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat menekan angka kelahiran. Masalah pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021 cukup berdampak dalam hal keterbatasan akses masyarakat kepada layanan kesehatan, khususnya layanan KB, sehingga penurunan angka kelahiran masih stagnan sepanjang tahun 2021.

Dengan anggaran yang minim sebesar 138.371.000 dan terpakai sebesar 135.531.500. Dan capaian sasaran Angka kelahiran total per WUS 100 % dan Rata-rata jumlah anak per Keluarga sebesar 100% semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungan dan Kabupaten/Kota.

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya angka kelahiran terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Angka kelahiran total per WUS

Indikator Angka kelahiran total per WUS merupakan rincian dari Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi, Dengan TFR sebagai acuan, suatu daerah dapat merencanakan program untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2021 Total Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) = **2,31**
- b. Pada tahun 2020 Total Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2020 = **2,24**
- c. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan TFR sekitar 0,07, walaupun ada peningkatan TFR, namun masih ada harapan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai.
- d.

Tabel 3.25

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2020		2021		
		T	R	T	R	
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	153.678	509.444	153.678	35.443	Sumber data : Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota dan Perwakilan BKKBN Kalteng

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Pada tahun 2021 jumlah Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera di Provinsi kalimantan tengah berjumlah 35.443, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang berjumlah 239.304. hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah keluarga yang belum dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya maupun yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar..Anggaran yang minim dari dana APBD 38.352.500 dengan realisasi 38.352.500 (100 %) yang digunakan untuk koordinasi data dengan Kabupaten/Kota dan lintas sector.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (tahun 2018-2021)

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera 1			
	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Tengah	244.060	239.862	239.304	35.443
Kotawaringin Barat	22.678	19.523	19.406	3.373
Kotawaringin Timur	38.413	38.719	38.528	5.225
Kapuas	41.519	41.522	41.563	6.569
Barito selatan	18.247	18.127	18.127	1.818
Barito utara	15.479	15.486	15.472	1.422
Sukamara	4.444	4.441	16.776	527
Lamandau	8.205	7.459	8.448	1.280
Seruyan	8.448	8.448	4.370	1.875
Katingan	16.366	16.341	7.103	3.325
Pulang Pisau	15.284	15.233	9.588	1.884
Gunung Mas	9.588	9.588	15.232	2.392
Barito Timur	13.402	13.044	7.617	1.548
Murung Raya	7.607	7.617	12.838	1.503
Kota Palangka Raya	24.380	24.314	24.236	2.702

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesiadapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih

sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut
Anggota keluarga melaksanakan ibadah

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakandaging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu set pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas telah memiliki pekerjaan tetap

- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampumembaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi

- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

3.10 Meningkatnya Akseptor KB

Dilihat dari capaian sasaran Meningkatkan Akseptor untuk dua tahun dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.27
Indikator Kinerja Sasaran 9

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,829	0,7985	90,58	0,834	0,795	95,32

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Dilihat data diatas didapatkan untuk sasaran meningkatnya akseptor KB untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang ditetapkan baik untuk indikator kinerja rasio pemakaian kontrasepsi. Dan ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat meningkatkan pemakaian kontrasepsi . Dengan anggaran yang minim sebesar 65.045.000 dan terealisasi sebesar 63.744.600. Dan capaian sasaran meningkatnya akseptor KB 98 %, ini semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungan serta komitmen dari Kabupaten/Kota.

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020-2021 :

Tabel 3.28
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	586	620	47	498	2.140	15.140	6.576	25.607
2	Kotawaringin	1.487	1.345	195	1.894	12.279	34.380	22.594	74.174

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		KONTRASEPSI							
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Timur								
3	Kapuas	791	529	51	899	5.797	22.836	15.558	46.461
4	Barito Selatan	204	260	8	171	2.492	9.307	9.063	21.505
5	Barito Utara	260	333	25	391	2.158	10.264	9.028	22.459
6	Katingan	193	122	11	409	4.577	14.269	8.439	28.020
7	Seruyan	294	123	44	433	2.293	8.597	4.092	15.876
8	Sukamara	383	46	4	273	1.223	7.748	2.183	11.860
9	Lamandau	342	114	89	118	1.540	7.466	2.684	12.353
10	Gunung Mas	81	438	9	275	2.807	15.126	2.034	20.770
11	Pulang Pisau	211	400	6	1.375	2.716	11.482	6.000	22.190
12	Murung Raya	485	420	10	404	2.856	9.138	6.340	19.653
13	Barito Timur	463	260	9	199	2.542	6.972	8.318	18.763
14	Kota P Raya	1.815	1.170	122	1.168	3.998	21.805	16.089	46.167
	JUMLAH	7.595	6.180	630	8.507	49.418	194.530	118.998	385.858

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.29
Metode Kontrasepsi Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		KONTRASEPSI							
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	648	765	67	572	2.354	15.819	6.939	27.164
2	Kotawaringin Timur	1.397	1.395	183	1.400	12.324	37.027	22.632	76.358
3	Kapuas	890	581	61	986	5.517	22.841	16.550	47.426
4	Barito Selatan	236	308	8	153	2.587	9.425	9.044	21.761
5	Barito Utara	271	341	25	406	2.296	10.711	8.988	23.038
6	Katingan	230	89	12	517	5.680	14.253	9.590	30.371

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		KONTRASEPSI							
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Seruyan	333	139	45	653	1.648	8.750	4.178	15.746
8	Sukamara	172	72	4	214	684	7.415	1.981	10.542
9	Lamandau	400	136	90	193	1.766	7.588	2.811	12.984
10	Gunung Mas	166	397	17	309	3.135	12.924	2.028	18.976
11	Pulang Pisau	91	559	8	344	1.727	9.051	3.842	15.622
12	Murung Raya	509	473	10	371	2.022	9.229	6.106	18.720
13	Barito Timur	277	267	13	117	2.271	4.596	4.899	12.440
14	Kota P Raya	1.908	1.217	123	1.155	4.235	21.795	15.921	46.354
JUMLAH		7.528	6.739	666	7.390	48.246	191.424	115.509	377.502

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

3.11 Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Dilihat dari capaian sasaran Meningkatkan Akseptor untuk dua tahun dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.30
 Indikator Kinerja Sasaran 11

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio	5,73	11,88	48,23	16,61	11,6	69,83

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dilihat data diatas didapatkan untuk sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang ditetapkan karena masyarakat Kalteng mempunyai kesadaran

dalam ber KB. Dan ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat meningkatkan kebutuhan berkontresepsi . Dengan anggaran yang minim sebesar 44.410.000 dan terpakai sebesar 44.256.000. Dan capaian sasaran menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 99,6 %, ini semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungan serta komitmen dari Kabupaten/Kota.

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 - 2021 :

Tabel 3.31
Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2020

N O	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGI N ANAK LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotawaringin Barat	39.225	13.618	1.800	3.794	3.315	4.709
2	Kotawaringin Timur	97.635	23.461	2.775	9.307	6.064	5.315
3	Kapuas	57.164	10.703	987	2.413	3.202	4.101
4	Barito Selatan	29.025	7.520	558	2.075	2.186	2.701
5	Barito Utara						

N O	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGI N ANAK LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
		25.325	2.866	662	918	700	586
6	Katingan	33.906	5.886	966	1.858	1.504	1.558
7	Seruyan	21.417	5.541	864	1.465	1.518	1.694
8	Sukamara	14.407	2.547	343	820	660	724
9	Lamandau	16.133	3.780	540	1.330	942	968
10	Gunung Mas	27.283	6.513	565	1.457	1.968	2.523
11	Pulang Pisau	25.835	3.645	317	940	1.151	1.237
12	Murung Raya	23.873	4.220	398	1.514	1.611	697
13	Barito Timur	23.516	4.753	459	1.433	1.016	1.845
14	Kota Palangkaraya	52.995	6.828	445	2.956	2.269	1.158
JUMLAH		487.739	101.881	9	32.280	28.106	6

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.32
Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotawaringin Barat	41.061	27.164	1.730	3.697	5.483	2.987
2	Kotawaringin Timur	96.856	76.358	2.110	7.893	5.271	5.224
3	Kapuas	62.590	47.426	1.075	4.872	3.837	5.380
4	Barito Selatan	28.912	21.761	528	1.945	2.055	2.623
5	Barito Utara	25.689	23.038	515	902	678	556
6	Katingan	35.594	30.371	795	1.557	1.392	1.479
7	Seruyan	21.279	15.746	814	1.526	1.613	1.580
8	Sukamara	13.073	10.542	281	964	585	701
9	Lamandau	16.401	12.984	437	1.125	922	933
10	Gunung Mas	22.724	18.976	600	1.213	1.062	873
11	Pulang Pisau	18.763	15.622	502	1.201	575	863
12	Murung Raya	23.851	18.720	572	2.015	1.588	956
13	Barito Timur	15.248	12.440	407	1.104	462	835
14	Kota Palangkaraya	52.995	46.354	490	2.816	2.202	1.133

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH	475.036	377.502	10.856	32.830	27.725	26.123

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota terkait bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar pengajuan peformulaan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga muncul anggapan bahwa Sektor Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya merupakan sektor pendukung dalam Pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Mudahnya akses dari internet dapat menyebabkan banyaknya informasi terkait program bangga kencana dan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat.
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan Program Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera yang

minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator, yaitu :

- Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat di tempuh melalui berbagai event kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik seperti mobil unit penerangan, videotron, radio, televisi, maupun internet yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas
- Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan informasi tentang KB sudah cukup baik hanya saja Animo dan kesadaran masyarakat untuk ber KB masih minim.
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Tantangan / Hambatan

Namun demikian sama dengan sasaran sebelumnya dari keberhasilan capaian tersebut di atas, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Masih kurang optimalnya koordinasi kebijakan, program dan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
- d. Belum optimalnya evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada
- e. Dalam rangka mencapai target TFR 2,19 pada akhir tahun 2020 dari kondisi saat ini yang masih 2,24 diperlukan upaya ekstra untuk mencapainya. Karena dalam menurunkan TFR, tidak dapat hanya semata-mata mengandalkan peningkatan kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB, tetapi jugabagaimana upaya dalam menekan kasus pernikahan dini dan pergaulan bebas yang berefek pada mengecilnya kasus persalinan remaja serta memotivasi pada PUS untuk mengurangi keinginan memiliki anak lebih dari 2.
- f. Dalam mencapai target CPR harus ada upaya ekstra untuk menambah jumlahakseptor baru melalui penyuluhan dan pelayanan yang prima selain menekan jumlah akseptor *dropout* sehingga efektif menaikkan Peserta KB aktif.
- g. Dalam menurunkan *unmeet need* tidak cukup dengan pelayanan KB berkualitas dan dukungan sarana prasarannya yang memadai, tetapi juga harus dibarengi dengan kegiatan advokasi KIE yang intensif .

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penguatan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan-pelatihan dan diklat / bimbingan teknis
- d. Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci merubah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap program Bangga Kencana (Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)
- e. Perlunya kebersamaan, dukungan, komitmen, kepedulian, partisipasi, dan kerja sama dari berbagai mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dalam mencapai target program.
- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan/forum daerah yang menangani bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2021 adalah sebesar 10.788.314.369 (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) ,dengan rincian

Tabel 3.33
 Kondisi BTL dan BL 2020 – 2021

JENIS BELAN	2020			2021		
	JUMLAH	REALISASI	%	JUMLAH	REALISASI	%
BTL/Modal	7.909.105.580	6.781.556.560	85,74	9.171.372.060	8.782.421.150	95,76
BL/Operasi	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25	11.610.310.876	10.778.357.710	92,83
Total	10.788.314.369	9.524.096.204	88,28	20.781.682.936	19.560.778.860	94,13

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

2. Realisasi anggaran Belanja perprogram kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
 Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			20.781.682.936	20.781.682.936	19.560.778.860	94,13	
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			20.559.461.936	20.559.461.936	19.342.955.160	94,08	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah			17.683.018.536	17.683.018.536	16.671.616.474	94,28	
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		121.210.910	121.210.910	106.845.550	88,15	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.								
	a.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.866.500	26.866.500	26.866.500	100	
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.300.000	18.300.000	18.292.000	99,96	
	c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.699.000	51.699.000	43.742.000	84,61	
	d.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.345.410	24.345.410	17.945.250	73,71	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.963.815.328	5.963.815.328	5.461.678.955	91,58	
	a.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.910.315.328	5.910.315.328	5.436.179.955	91,98	
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.500.000	8.500.100	8.500.000	100	-
	c.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	45.000.000	16.900.000	37,78	
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.600.000	17.600.000	3.400.000	19,32	
	a		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.600.000	17.600.000	3.400.000	19,32	
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		582.000	582.000	582.000	100,00	
	a.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.762.000	-	-	0,00	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.882.276.298	1.882.276.298	1.712.646.450	90,99	
	a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	
	b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.429.034.300	1.429.034.300	1.263.243.550	88,4	
	c.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.011.000	34.011.000	34.011.000	100	
	d.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.762.000	21.762.000	21.725.000	99,83	
	e.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	24.990.000	99,96	
	f.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.072.998	298.072.998	295.785.900	99,23	
	g.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.396.000	64.396.000	62.891.000	97,66	
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah		8.194.846.000	8.194.846.000	7.929.585.990	97,14	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	a.		Pengadaan Mebel	705.866.000	705.866.000	696.610.850	98,69	
	b.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.57.320.000	7.57.320.000	7.232.975.140	96,99	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.396.741.200	1.396.741.200	1.322.432.172	94,68	
	a.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.005.000	4.005.000	4.005.000	100	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	b.		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	125.350.000	125.350.000	80.906.922	64,54	
	c.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.386.200	1.267.386.200	1.237.520.250	97,64	
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		137.606.800	137.606.800	134.445.357	97,7	
	a.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.606.800	56.606.800	54.002.400	95,4	
	b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	49.910.957	99,82	
	c.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	11.535.000	96,13	
	d.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	9.997.000	99,97	
	e.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.426.673.400	1.426.673.400	1.403.370.460	98,37	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		152.245.200	152.245.200	139.197.660	91,43	
	a.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	90.000.000	90.000.000	77.042.780	85,6	
	b.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	62.245.200	62.245.200	62.154.880	99,85	
	c.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum.						
2.		Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		1.159.490.200	1.159.490.200	1.149.496.800	99,14	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	a.		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.054.228.200	-	0	0.00	
	b.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	105.262.000	-	0	0.00	
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		114.938.000	114.938.000	114.676.000	99,77	
	a.		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	114.938.000	114.938.000	114.676.000	99,77	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			944.068.000	162.072.848	162.072.848	28,85	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		231.422.400	231.422.400	230.728.000	99,7	
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	62.666.400	62.666.400	62.556.900	99,83	
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	168.756.000	168.756.000	168.171.100	99,65	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		184.825.000	184.825.000	173.808.822	94,04	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.								
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.200.000	95.200.000	85.414.072	89,72	
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	89.625.000	89.625.000	88.394.750	98,63	
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		123.064.000	123.064.000	117.124.000	95,17	
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.411.000	40.411.000	40.411.000	100	
b.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	82.653.000	82.653.000	76.713.000	92,81	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.752.000	-	-	0.00	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			97.157.400	80.071.250	96.757.250	99,59	
1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		70.157.400	70.157.400	69.957.250	99,71	
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.157.400	70.157.400	69.957.250	99,71	
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		27.000.000	27.000.000	26.800.000	99,26	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0		
b.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	27.000.000	27.000.000	26.800.000	99,26	
3.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	0,00-	0	0	
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00-	0	0	
v.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			171.104.000	171.104.000	164.575.700	96,18	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		171.104.000	171.104.000	164.575.700	96,18	
	a.		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	101.104.000	101.104.000	99.895.700	98,8	
	b.		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	70.000.000	70.000.000	64.680.000	92,4	
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			273.633.200	273.633.200	238.981.600	87,34	
1.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah.		220.825.600				
		Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			220.825.600	217.309.100	98,41	
	a.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	74.250.000	74.250.000	73.356.000	98,8	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	b.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	146.575.600	146.575.600	143.953.100	98,21	
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		52.807.600	52.807.600	21.672.500	41,04	
	a.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	52.807.600	52.807.600	21.672.500	41,04	
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			368.564.000	368.564.000	245.992.854	66,74	
1.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		315.814.000	315.814.000	200.815.354	63,59	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	a		Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	89.149.000	89.149.000	84.144.250	94,39	
	b		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	226.665.000	226.665.000	116.671.104	51,47	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		52.750.000	52.750.000	45.177.500	85,64	
	a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	52.750.000	52.750.000	45.177.500	85,64	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			222.221.000	222.221.000	217.823.700	98,02	
I.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			39.440.000	39.440.000	38.036.500	96,44	
1.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		39.440.000	39.440.000	38.036.500	96,44	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan . Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0	0	0	0	
b.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	39.440.000	39.440.000	38.036.500	96,44	
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			145.671.000	73.326.000	-	0	
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		138.371.000	138.371.000	135.531.200	97,95	
			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi.	73.326.000	73.326.000	71.786.700	97,9	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.			Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
b.			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	65.045.000	65.045.000	63.744.500	93	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			444.110.000	444.110.000	44.256.000	99,65	
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		444.110.000	444.110.000	44.256.000	99,65	
a.			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	444.110.000	444.110.000	44.256.000	99,65	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Rp.)			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	0	0'00	0	0	

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi belanja langsung tahun 2021 sebesar 94,13 %. Untuk tahun 2021 ada dana yang dikembalikan ke negara berjumlah 18.825.605.056 (3,91 %) dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 41,04 % , Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK) 41,04 % , Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 64,54 % , Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 37,78 % , Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 19,32 % , kegiatan berjalan 100 % namun tidak menghambat pencapaian output dari kegiatan karena secara fisik terealisasi 100%.

Tabel 3.35
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	10	13	16	19	5	8	11	14	17	20
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	9,94	10,41	10,88	11,83	11,83	12,3	7,6	6,5	7,58	6,34	6,34	7,58
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,78	19,57	21,58	23,59	27,61	27,61	29,62	87,39	88,76	94,51	80,85	80,85	94,51
3	Rasio KDRT	0,0306	0,0275	0,0244	0,0213	0,0151	0,0151	0,012	0,0834	0,0181	0,1761	8,5097	8,5097	4,491
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja di bawah umur (%)	0,53	0,38	0,3	0,23	0,08	0,08	0	10,96	7,56	11,45	0	0	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,55	52,03	53,06	54,09	56,15	56,15	57,18	53,55	53,61	49,19	56,6	57,6	105,15

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	10	13	16	19	5	8	11	14	17	20
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,90*)	78,2	78,25	79,86	81,2	79,67	81,88	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41	82,41
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,33*)	89,34	89,36	90,33	91	89,88	91,34	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03	89,03
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera													
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,80*)	1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	0,58	0,58	0,66	2,24	2,24	2,24
2	Rasio akseptor KB	77,91	78,8	79,7	80,6	82,39	82,39	83,29	78,1	79,2	79,15	79,85	79,85	80,41
3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	376.606	378.790	382.023	394.756	412.413	412.413	425.000	368.652	373.140	319.193	398.563	398.563	404.971
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	183.937	176.103	170.497	164.891	153.678	153.678	148.072	55.110	243.211	244.060	239.740	239.740	239.304

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36
 Capaian Indikator Sasaran Dinas P3APPKB Tahun 2021

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	85,42
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan di lembaga legislatif • Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 	100 100,5
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kab/kota layak anak minimal kategori pratama • Rasio anak korban kekerasan 	66,62 282,12
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	84,62
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan Anak	100
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelapora program dan anggaran	B+
9	Menurunnya angka kelahiran	100
10	Meningkatnya akseptor KB	95,32
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	69,83
	JUMLAH	107,03

Tabel 3.37
Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021	Target Capaian Triwulan IV			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,43	3,43	2,93	85,42	Bidang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislative	persen	28,89	35,56	35,56	100	Bidang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,46	33,46	33,63	100,5	Bidang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0151	0,0151	0,0151	100	Bidang Perlindungan Perempuan dan Kwalitas Keluarga
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100	100	100	100	Bidang Perlindungan Perempuan dan Kwalitas Keluarga
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	42,86	42,86	28,57	66,62	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0151	0,0151	4,26	282,12	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan	persen	100	100	84,62	84,62	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021	Target Capaian Triwulan IV			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		layanan sesuai standar						
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	15,56	15,56	15	100	Bidang Data
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP LHE	Skor	B+ / BB	B+	B+	B+	Sekretariat
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,24	2,24	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,834	0,834	0,795	95,32	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	16,61	16,61	11,6	69,83	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari data 11 (sebelas sasaran) dan 14 (empat belas) indikator kinerja Utama pada masa pandemi Covid 19 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mencapai target sasaran berjumlah 10 (Sepuluh) indikator dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2021, dari 14 (empat belas) indicator kinerja utama 13 (tiga belas) mencapai target dan 1 (satu tidak mencapai target. Ini adalah berkat dukungan dan komitmen Lintas Program, Kabupaten/Kota dan Lintas sector yang terkait dalam pencapaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya perkembangan dukungan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
BTL 2016 - 2021

Belanja Tidak Langsung (BTL)						2021 (belanja Modal)
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
Pagu Anggaran	5.977.097.105,10	6.931.201.216	7.313.078.668	7.611.123.080	7.909.105.580	9.171.372.060
Realisasi	5.853.917.664	6.129.066.675	6.458.149.599	5.994.903.731	6.781.556.560	8.782.421.150
%	97,94	88,43	88,31	78,77	85,74	95,76

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.39
Belanja Langsung (BL) 2016 - 2021

Belanja Langsung (BL)						2021 (Belanja Opearsional)
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
Pagu Anggaran	6.387.500.000	5.059.510.000	7.828.755.992	10.462.196.406	2.879.208.700	11.610.310.876
Realisasi	6.226.672.355	4.927.634.188	4.927.634.188	10.051.032.000	2.742.539.600	10.778.357.710
%	97,48	97,39	89,37	96,07	95,25	92,83

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Pada tahun anggaran 2021 Terdapat 5 (lima) sub kegiatan dengan tingkat realisasi dibawah 80 persen sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Kegiatan dibawah 80%

No	Nama Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Relisasi	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.345.410	17.945.250	73,71
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	16.900.000	37,78
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.600.000	3.400.000	19,32
II	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	52.807.600	21.672.500	41,04
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	226.665.000	116.671.104	51,47

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik selaras dalam RPJMD 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021, maupun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target 11 (Sebelas) sasaran yang telah ditetapkan. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang mencapai target 14 (empat belas) indikator kinerja utama mencapai target. Meskipun keadaan pandemi covid-19. Dengan strategi dan komitmen dan koordinasi yang kuat dengan komunikasi secara digital dan virtual sehingga indikator sasaran tercapai.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik sasaran dan Indikator Kinerja, capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu ke Renstra dan RPJMD 2017-2021.
4. Dengan adanya peraturan gubernur Kalimantan Tengah no 20 tahun 2019 dengan dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kedudukan dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada fungsi pelayanan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya koordinasi kedepannya tapi ada fungsi pelayanan, sehingga pemerintah hadir dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah
5. Realisasi anggaran program kegiatan teknis yang mendukung pencapaian sasaran strategis RENSTRA Tahun 2021 sebesar Rp.19.560.778.860 (94,13%), dari total dana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

- Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 20.781.682.936,-
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melakukan keterbukaan informasi untuk Dokumen Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi capaian di masukkan di **Website DP3APPKB : www.dp3appkb.kalteng.go.id**.
 7. Dengan pencapaian target sasaran di 11 (sebelas) indikator semua mencapai target, indikator sasaran yang mengacu dengan RENSTRA dan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di Kalimantan Tengah secara Outcome dengan melindungi Perempuan dan Anak dari kekerasan dengan tepatnya pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah dan juga Ketahanan Keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dengan kontrasepsi.
 8. Melaksanakan evaluasi dalam bentuk rencana aksi secara berkala terhadap pencapaian target yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK), baik bulanan atau triwulan dan Semester dalam pencapaian keberhasilan Program dan tindak lanjut dalam pencapaian target sasaran dan indikator capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

B. Saran

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup berhasil meskipun ada indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan tugasnya. namun demikian masih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis RENSTRA dan sumber daya yang dimiliki/mendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembuatan RENSTA yang baru.
2. Perlu adanya SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab dalam mencapai hasil yang maksimal.
3. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih perlu ditingkatkan begitu juga anggaran

4. Kewenangan yang belum kuat antara fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyangkut Program KB.
5. Perlu peningkatan Kualitas SDM dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
7. Dalam keberhasilan pencapaian kinerja dimasa pandemi 19 dengan strategi yang tepat berkenan kiranya Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran dalam peningkatan kualitas kinerja dan Inovasi sesuai dua urusan di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Dalam penyusunan RENSTRA yang baru perlu penajaman dalam penentuan sasaran dan Indikator yang ada sesuai Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendasar pada target dan sasaran kinerja, agar dalam laporan capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP tidak ditemui kendala dalam mengukur capaian kinerja yang tertuang dalam IKU Renstra .

**Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**

Untuk pertama kalinya Bunda Forum Anak Mengikuti MUSRENBANG



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 23 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 005/ 122 /III/Bappitbang

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

di -

Hal : Undangan Musrenbang RPJMD

TEMPAT

Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026

**Perguruan Tinggi / Perbankan / Akademisi / LSM / Ormas / Asosiasi dan Profesi/
Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama :**

170. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kalimantan Tengah

171. Bunda Forum Anak Provinsi Kalimantan Tengah



172. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Nilai 77,68 (BB) memenuhi komponen pemenuhan dan reformasi birokrasi untuk 8 area perubahan.

KOMPONEN PENILAIAN			NILAI		%
			BOBOT	UNIT	
A.	PENGUNGKIT		36,30	28,20	77,68
	I.	PEMENUHAN	14,60	12,24	
		1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,85	
		2 DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00	
		3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00	
		4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	1,00	
		5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,20	
		6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,07	
		7 PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	1,56	
		8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	1,57	
	II.	REFORM	21,70	15,96	
		1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	1,52	
		2 DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	1,02	
		3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50	
		4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75	2,46	
		5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	0,75	
		6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,62	
		7 PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,35	
		8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	
TOTAL PENGUNGKIT			36,30	28,20	

SAKIP DP3APPKB dengan nilai BB Peringkat ke-5 dari 38 Perangkat Daerah

5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61,55	B	63,48	B	71,12	BB	70,57	BB
---	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Piala dan Piagam Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi 2021



Kalimantan Tengah mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Provinsi Dan untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021



Mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya dari Kementerian PP dan PA RI Tahun 2020 Merupakan Penghargaan yang diberikan kepada Kementerian PP dan PA RI yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Kabupaten /Kota Tingkat Pratama dari Kementerian PP dan PA RI Tahun 2020 Merupakan Penghargaan yang diberikan kepada Kementerian PP dan PA RI yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

a. Kabupaten Kotawaringin Barat



b. Kabupaten Kotawaringin Timur



c. Kabupaten Murung Raya



d. Kabupaten Katingan



e. Kabupaten Lamandau



f. Kota Palangka Raya



Kalimantan Tengah Terbaik Nomor 1 di Indonesia. Dalam Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Tengah



Provinsi melakukan pendampingan pembentukan UPTD-PPA di Kabupaten/Kota dalam pembuatan kajian akademis.



Telah terbentuknya UPTD-PPA di Kabupaten/Kota :

1. Barito Utara tahun 2019
2. Lamandau tahun 2020
3. Kota Palangka Raya tahun 2020
4. Kasongan tahun 2020
5. Kotawaringin Barat tahun 2020
6. Pulang Pisau tahun 2021
7. Kapuas tahun 2021

Yang memberikan pelayanan secara GRATIS kepada Masyarakat.

Tahun 2021 DAK Nonfisik PPA

1. UPT PPA Provinsi Kalteng
2. Kab. Barito Utara
3. Kab. Kota Aaringin Timur
4. Kota Palangka Raya

Tahun 2022 DAK Nonfisik PPA

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kab. Barito Utara
3. Kab. Kapuas
4. Kab. Kota Waringin Barat
5. Kab. Katingan
6. Kab. Lamandau
7. Kab. Pulang Pisau

Kalimantan Tengah mendapat Penghargaan KLA tingkat Pratama tahun 2021 di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan.



FORUM ANAK DAERAH
Mengikuti MUSRENBANG Secara
Virtual 8 April 2021
memastikan Hak Mereka Atas
Informasi Pembangunan



FORUM ANAK DAERAH
Mengikuti MUSRENBANG RPJMD 2021
2026
Secara Virtual, 2 September 2021

Menerima penghargaan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 pada peringkat 2 (Dua) Kategori Menuju Informatif.



BERINOVASI

1. E-Pengaduan



2. E-Data



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P6N2pH8nxTESHXIK_tT3hMV8Ty55excRjQF1XqEuDA/edit#gid=561904408

PENDATAAN ANAK USIA 0 -17 TAHUN YANG ORANG TUA NYA MENINGGAL KARENA TERPAKAR COVID- 19 (MENINGGAL DUNIA) DINAS P3APPKB SE KALIMANTAN TENGAH

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P6N2pH8nxTESHXIK_tT3hMV8Ty55excRjQF1XqEuDA/edit#gid=561904408

No	NAMA KABUPATEN	BULAN			KATEGORI ANAK			KORBAN TERPAKAR COVID-19					JUMLAH SELURUH	
		1	2	YAHIM	MATU	SIWA PUTU	WANITA	ORANG TUA TUNGGAL (MAYAT/BU)	KAKAK/ NENEK	PAMA/ PATE/ KAKAK/ KERABAT	KELUARGA A SUKAN KERABAT	LEMBAGA PARTI ASUHAN		LEMBAGA NON PARTI ASUHAN
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	KOTA WAMANA BAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KOTA WAMANA TAYUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KAPUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BARITO MUDA	5	4	11	0	0	0	17	0	0	0	0	0	
5	BARITO SAMPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	SUKAMARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	UNDAK	5	0	10	5	0	0	15	0	0	0	0	0	
8	SELUKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	KATINGAN	3	3	7	4	0	0	11	0	0	0	0	0	
10	PULANG PISAL	15	17	19	12	1	0	51	0	1	0	0	0	
11	GENENE MAS	7	10	7	0	0	0	17	0	0	0	0	0	
12	BARITO TIMUR	1	4	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	
13	KURUNG RAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ENANGKARONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		82	106	107	74	7	0	94	0	1	0	0	0	188



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/065/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Dra. Marwati Sukwatini**
Jabatan : **Plt.Sekretaris Dinas Pemberdaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya koordinasi perencanaan ,pelaksanaan,pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	B+	100

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/066/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Mariana,SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	3,43	2,93	85,42
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	35,56	35,56	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,46	33,63	100,5

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.


Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/069/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Dr.Amelia Henisaputri,SE,M.Pd**
Jabatan : **Plt.Kepala Bidang Data Dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki system data gender dan anak	persen	15,56	15	100

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.



**Plt. Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/068/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Mulyo Suharto,SH**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	42,86	28,57	66,62
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	persen	100	84,62	84,62

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/061/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Dra. Marwati Sukwatini**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	rasio	0,0151	0,0151	100
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	100

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I
19680717 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/010 /Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Aristoteles,S.Kp.,M.Pd**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,24	100
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1	1	100
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,834	0,7985	95,32
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	16,61	11,6	69,83

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.



**Plt. Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547

PALANGKA RAYA

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 050/011/Sekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Penghargaan kepada :

Nama : **Jumrah,SST,M.A**
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	persen	100	100	100
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	persen	100	84,62	84,62

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, di ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

DR. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Tingkat I

19680717 199903 2 006